



**KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 407 TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

NOMOR : 29/RENJA-BPKD/2020

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 407 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
23. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut Renja-PD;
- KEDUA : Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan Nomor Renja-PD, dengan urutan nomor Renja-PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KETIGA : Renja SKPK merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kota untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2020 yang di mulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian masing-masing dokumen disusun berdasarkan Nomor Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua;
- KEEMPAT : Renja SKPK digunakan sebagai :
- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2020;
 - b. pedoman Penyusunan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
- KELIMA : Dokumen Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) masing-masing;
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 September 2019
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 407 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NOMOR RENJA	SKPK	KET
1	2	3	4
1	01 / Renja-PK/2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	02/ Renja-Dinkes/2020	Dinas Kesehatan	
3	03/Renja-PUPR/2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
4	04/Renja-Kesbangpol/2020	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	05/Renja-Kantor Satpol PP/2020	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
6	06/Renja-Dinsos/2020	Dinas Sosial	
7	07/Renja-PMPTSP/2020	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	
8	08/Renja-PP,PA,PP & KB/2020	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	09/Renja-DKPP & Pangan/2020	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
10	10/Renja-Pertanahan/2020	Dinas Pertanahan	
11	11/Renja-DLH/2020	Dinas Lingkungan Hidup	
12	12/Renja-Disduk-Capil/2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	13/Renja-DPMG/2020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
14	14/Renja-DP3A,P2&KB/2020	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15	15/Renja-Dishub/2020	Dinas Perhubungan	
16	16/Renja-Diskominfo/2020	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
17	17/Renja-Disperindagkop/2020	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

18	18/Renja-Disporapar/2020	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
19	19/Renja-Arpus/2020	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	20/Renja-Setdako/2020	Sekretariat Daerah Kota
21	21/Renja-Sekwan/2020	Sekretariat DPRK
22	22/Renja-Banda Sakti/2020	Kecamatan Banda Sakti
23	23/Renja-Muara Dua/2020	Kecamatan Muara Dua
24	24/Renja-Blang Mangat/2020	Kecamatan Blang Mangat
25	25/Renja-Muara Satu/2020	Kecamatan Muara Satu
26	26/Renja-BPBD/2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	27/Renja-Inspektorat/2020	Inspektorat
28	28/Renja-Bappeda/2020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	29/Renja-BPKD/2020	Badan Pengelola Keuangan Daerah
30	30/Renja-BKPSDM/2020	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31	31/Renja-DSI & Pendidikan Dayah/2020	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
32	32/Renja-MPU/2020	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
33	33/Renja-Baitul Mal/2020	Sekretariat Baitul Mal
34	34/Renja-MAA/2020	Sekretariat Majelis Adat Aceh
35	35/Renja-MPD/2020	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	31
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi . .	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah . . .	34
BAB IV PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe. Selain itu Rencana Kerja (Renja) BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2020 juga mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu.

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2020 ini diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 ini dibuat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Lhokseumawe, 30 September 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**



AZWAR, SH, MAP

NIP. 19630925 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pelaksana pemerintah daerah. Renja Perangkat Daerah juga berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMK serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMK dan RKPK. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan awal Perangkat Daerah. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota DPRK Lhokseumawe.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah

terdiri dari tiga tahapan utama. Tahapan pertama yaitu persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta persiapan data dan informasi. Tahapan yang kedua yaitu penyusunan rancangan awal dan penyusunan rancangan akhir renja Perangkat Daerah. Tahapan Terakhir adalah penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPK dan Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan seperti Renstra Perangkat Daerah, RKPK dan RPJMK. Maka, dalam proses penyusunannya Renja Perangkat Daerah dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Disamping itu, Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Kota (APBK) serta dasar dalam mengusulkan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBA Propinsi dan APBN.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul dalam satu tahun anggaran. Renja juga mempunyai arti yang strategis karena merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah:

1. undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
11. peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
13. peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
21. qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032;
22. qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022;
23. qanun kota lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
24. qanun kota lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
25. qanun Kota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
26. peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

27. peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah dan menjadi alat ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. sebagai rumusan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk tahun 2020.
2. sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2020.
3. sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan turunan dari RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPK, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPK dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPK.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2018, Perangkat Daerah telah melaksanakan 9 program dan 57 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 10.078.481.787,- (Sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.014.118.835,- (Sembilan milyar empat belas juta seratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 adalah sebesar 89,44 % yang termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dapat diuraikan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya dengan kategori sebagai berikut:

- A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 19 kegiatan. Namun ada 1 kegiatan pada tahun tersebut yang tidak terealisasi yaitu:
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 100.000.000,-. Secara fisik kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi keuangannya 0%.
- B. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 11.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.923.000,- atau 95,82% dengan output Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 568.627.744,- terealisasi sebesar Rp. 411.876.269,- atau 72,43% dengan output Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 306.236.800,- terealisasi sebesar Rp. 298.716.000,- atau 97,54% dengan output Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD 49 orang atau 588 OB terealisasi sebanyak 49 orang atau 588 OB atau 100%.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp.120.000.000,- atau 98,52% dengan output Periode Penyediaan Alat tulis Kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.449.250,- atau 99,85% dengan output Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.811.750,- terealisasi sebesar Rp. 20.715.750,- atau 99,54% dengan output Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.900.000,- atau 95% dengan output Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan 365 eks terealisasi sebanyak 365 eks atau 100%.
 - Penyediaan Makanan dan Minuman dari rencana anggaran sebesar Rp.70.000.000,- terealisasi sebesar Rp.64.694.500,- atau 92,42 % dengan output Periode Penyediaan Makanan dan Minuman selama 11 bulan terealisasi selama 11 bulan atau 100%.
 - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 427.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 426.487.658,- atau 99,88% dengan output Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
 - Penyediaan jasa pegawai tidak tetap dari rencana anggaran sebesar Rp. 759.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 659.870.000,- atau 86,88 % dengan output Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap 150 Org atau 1.500 OB selama 10 bulan terealisasi sebanyak 150 orang atau 1.500 OB selama 10 bulan atau 100 %.
- b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 Kegiatan yaitu:
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 581.537.218,- terealisasi sebesar Rp. 535.781.000,- atau 92,13% dengan output Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 5 jenis terealisasi 5 jenis atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 268.963.125,- terealisasi sebesar

Rp. 205.305.810,- atau 76,33% dengan output Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 12 bulan atau 100%.

- Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 138.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 124.312.000,- atau 89,89% dengan output Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit atau 84 UB terealisasi 7 unit atau 84 UB atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 102.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 96.926.750,- atau 95,03% dengan output Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan halaman kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.878.000,- atau 35,98% dengan output Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor selama 12 bulan atau 100%.
- c) Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
- Penyusunan rencana kerja (Renja) satuan kerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.656.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.612.000,- atau 97,34% dengan output Jumlah Buku RENJA Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen atau 100%.
- e) Program efektifitas pengeluaran daerah, yang terdiri dari 3 Kegiatan yaitu:
- Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe anggaran sebesar Rp. 122.800.000,- terealisasi sebesar Rp.117.420.600,- atau 95,62% dengan output jumlah buku

sebanyak 10 buku dan Adanya system penggajian yang efektif selama 12 bulan atau 100%.

- Penelitian Dokumen Belanja Bantuan PEMKO Lhokseumawe anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp.40.000.000,- atau 100% dengan output periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe selama 4 Triwulan atau 100%.
 - Penataan fungsi Pengelolaan Kas anggaran sebesar Rp. 129.200.000,- terealisasi sebesar Rp.127.117.600,- atau 98,39% dengan output Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas selama 12 bulan atau 100%.
- f) Program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan daerah, yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu :
- Penagihan Rutin Tunggal Pajak dan Restribusi Daerah anggaran sebesar Rp. 385.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 372.167.572,- atau 96,67% dengan Output Periode Penagihan Rutin Tunggal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selama 4 Triwulan atau 100%
 - Pendataan wajib pajak PBB anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.200.000,- atau 100% dengan output Periode Pendataan Wajib Pajak PBB selama 12 bulan atau 100%.
 - Sosialisasi dan Informasi Retribusi dengan rencana anggaran sebesar Rp. 50.460.000,- terealisasi sebesar Rp.50.460.000,- atau 100% dengan output Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi sebanyak 1 kali atau 100%.
 - Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- terealisasi sebesar Rp.7.500.000, atau 100 %, dengan output Periode Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB selama 12 bulan atau 100 %

- Pengembangan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.571.900, atau 98,57 %, dengan output Periode Pendataan Wajib Pajak PBB selama 4 triwulan atau 100 %
 - Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 46.000.000,- terealisasi sebesar Rp.45.810.000,- atau 99,59%, dengan output Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100 %
- g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19 Kegiatan, 18 kegiatan yang memenuhi target yaitu:
- Penyusunan Analisa Standar Belanja Perangkat Daerah rencana anggaran sebesar Rp. 45.900.000- terealisasi sebesar Rp. 39.604.500.- atau 86,28% dengan output Jumla Buku Analisa Standar (ASB) Sebanyak 50 buku atau 100%.
 - Penyusunan Standar Satuan Harga dengan rencana anggaran sebesar Rp. 57.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.260.000,- atau 96,95% dengan output Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH) sebanyak 40 buku SSH atau 100%.
 - Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 36.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.451.000,- atau 99,87% dengan output Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen 100%
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. Rp. 961.973.000,- terealisasi sebesar Rp. 885.123.190,- atau 92,01% dengan

output t Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%.

- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 314.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 254.967.200,-. atau 81,2% dengan output Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA Perangkat Daerah sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 207.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.765.700,- atau 93.12% dengan output Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dan DPPA Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 277.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 255.702.000,- atau 92,31% dengan output Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%.
- Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 45.460.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.602.050,- atau 84,91% dengan output Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA Perangkat Daerah sebanyak 50 buku atau 100%.
- Pembinaan/Pergeseran Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 68.580.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.678.906,- atau 81.19% dengan output Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran sebanyak 2 kali atau 100%.

- Penyusunan rancangan Qanun tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 127.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.325.861,- atau 62.8% dengan output Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 1 Ragan atau 100%.
- Peningkatan manajemen keuangan daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 284.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 283.584.740,- atau 99,61% dengan output Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register sebanyak 3 dokumen atau 100%.
- Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp. 204.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 204.149.185,- atau 99,9% dengan output Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebanyak 3 jenis buku atau 100%.
- Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.167.121.700,- terealisasi sebesar Rp. 166.871.520,- atau 99,85% dengan output Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA selama 12 bulan atau 100%
- Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 81.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.400.000,- atau 84,18% dengan output Jumlah Peserta Bimtek Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan sebanyak 66 orang atau 100%
- Penyusunan rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp.253.365.000,- terealisasi sebesar Rp. 253.236.423,- atau 99,95% dengan output Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan KDH

Tentang Perjabaran Pertanggungjawaban APBK sebanyak 3 jenis buku atau 100%

- Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 350.439.250,- terealisasi sebesar Rp. 334.565.059,- atau 95,47% dengan output Periode Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR selama 4 triwulan atau 100%.
 - Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 147.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 141.927.000,- atau 96,16% dengan output Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB selama 4 triwulan atau 100%.
 - Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak dengan rencana anggaran sebesar Rp. 482.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 432.599.698,- atau 89,66% dengan output Jumlah Blangko SPPT PBB, SSPD PBB dan DHKP sebanyak 3 jenis blangko atau 100%
- h) Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah, yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:
- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.977.000,- atau 99,97% dengan output Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran sebanyak 2 jenis buku atau 100%.
 - Rekonsiliasi laporan keuangan Perangkat Daerah rencana anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.973.500,- atau 99,96% dengan output Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen atau 100%.

i) Program Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan daerah
10 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan buku inventaris aset dengan anggaran sebesar Rp. 31.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.025.000,- atau 82,88% dengan output Jumlah Buku Investarisasi Aset Daerah sebanyak 3 jenis buku atau 100%.
- Inventarisasi sertifikasi barang / aset daerah anggaran sebesar Rp. 82.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.630.000 atau 12,38 % dengan output Periode Inventarisasi, Sertifikasi Barang/Aset Daerah selama 12 bulan atau 100%.
- Verifikasi penyusunan laporan realisasi PPKD anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100 % dengan output Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD selama 4 triwulan atau 100%.
- Pemeliharaan aset daerah bergerak dan tidak bergerak anggaran sebesar Rp. 470.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 467.768.179,- atau 99,37% dengan output Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak selama 12 bulan atau 100%.
- Penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.991.000,- atau 17,76 % dengan output Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak selama 12 bulan atau 100%.
- Rekonsiliasi laporan barang milik daerah dengan Perangkat Daerah di Jajaran PEMKO Lhokseumawe dengan anggaran sebesar Rp. 124.940.020,- terealisasi sebesar Rp. 85.390.200,- atau 68,34% dengan output Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD sebanyak 35 Perangkat Daerah atau 100%.

- Rekonsiliasi aset lancar dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Lhokseumawe dengan anggaran sebesar Rp. 67.870.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.320.000,- atau 93,3 % dengan output Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar sebanyak 35 Perangkat Daerah atau 100%.
 - Pengelolaan aplikasi persediaan dengan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 169.960.000,- atau 99,98% dengan output Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan selama 4 triwulan atau 100%.
 - Pengelolaan aplikasi SIMDA BMD dengan anggaran sebesar Rp. 239.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.979.265,- atau 83,25% dengan output Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD selama 4 triwulan atau 100%.
 - Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 44.620.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.960.000,- atau 91,8% dengan output Jumlah Buku RKBMD sebanyak 50 buku atau 100%.
- j) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
- Pemeliharaan jaringan SIPKD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 105.700.000,- terealisasi sebesar Rp.105.635.000,- atau 99,94% dengan output Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah selama 12 bulan atau 100%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan Juni 2019 seperti tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah s.d Tahun 2019
Kota Lhokseumawe

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) s/d Juni 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8=(7/6)	Rp 9	Rp 10=(5+7+9)	Rp 11=(10/4)
4.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.121.941.364		2.320.096.294	2.049.632.427	88,34	990.806.323	3.040.438.750	30,04
4.04.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.935.304		11.400.000	10.923.000	95,82	3.310.500	14.233.500	20,95
4.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.227.041.943		568.627.744	411.876.269	72,43	195.215.651	607.091.920	27,26
4.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (49 Org x 12 Bulan)	1.865.462.036		306.236.800	298.716.000	97,54	168.750.000	467.466.000	25,06
4.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	503.769.628		120.000.000	120.000.000	100,00	37.338.972	157.338.972	31,23
4.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.111.200		34.500.000	34.449.250	99,85	11.409.000	45.858.250	22,25
4.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.611.750		20.811.750	20.715.750	99,54	4.060.000	24.775.750	23,68
4.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	11.438.616		2.000.000	1.900.000	95,00	800.000	2.700.000	23,60
4.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	400.351.560		70.000.000	64.694.500	92,42	23.412.500	88.107.000	22,01
4.04.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.071.720.101		427.000.000	426.487.658	99,88	199.302.100	625.789.758	58,39
4.04.01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	3.663.499.226		759.520.000	659.870.000	86,88	347.207.600	1.007.077.600	27,49
4.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.877.089.661		1.098.800.343	965.203.560	87,84	1.149.624.630	2.114.828.190	43,36
4.04.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.818.922.040		-	-	-	768.955.780	768.955.780	42,28
4.04.02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	974.941.424		581.537.218	535.781.000	92,13	244.200.000	779.981.000	80,00
4.04.02.022.	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	769.883.000		268.963.125	205.305.810	76,33	36.370.000	241.675.810	31,39
4.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	627.401.228		138.300.000	124.312.000	89,89	72.545.100	196.857.100	31,38
4.04.02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	602.587.769		102.000.000	96.926.750	95,03	27.553.750	124.480.500	20,66
4.04.02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	83.354.200		8.000.000	2.878.000	35,98	-	2.878.000	3,45
4.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	510.510.000							
4.04.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	255.255.000		-	-	-	-	-	-
4.04.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	255.255.000		-	-	-	-	-	-
4.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	185.000.000							
4.04.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	185.000.000		-	-	-	-	-	-
4.04.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyediaan Dokumen LKPI, IKK dan EKPOD	202.000.000							
4.04.06.002.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah buku laporan keuangan semesteran	202.000.000		-	-	-	-	-	-
4.04.07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	25.082.120		1.656.000	1.612.000	97,34	13.952.000	15.564.000	62,05
4.04.07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENUA SKPD	10.082.120		1.656.000	1.612.000	97,34	780.000	2.392.000	23,73
4.04.07.004.	Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SOP SKPD	15.000.000		-	-	-	13.172.000	13.172.000	87,81
4.04.08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	20.000.000							
4.04.08.001.	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Penyelenggaraan Pameran Daerah	20.000.000		-	-	-	-	-	-
4.04.15.	Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Daerah	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	1.068.392.500		292.000.000	284.538.200	97,44	125.141.375	409.679.575	38,35
4.04.15.014.	Verifikasi Dokumen Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe	565.575.950		122.800.000	117.420.600	95,62	48.826.075	166.246.675	29,39
4.04.15.015.	Penelitian Dokumen Belanja Bantuan Pemko Lhokseumawe	Periode Penelitian Dokumen Belanja Pemko Lhokseumawe	40.000.000		40.000.000	40.000.000	100,00	-	40.000.000	100,00
4.04.15.016.	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	462.816.550		129.200.000	127.117.600	98,39	76.315.300	203.432.900	43,96
4.04.16.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Besaran penerimaan PAD	3.655.123.370		596.160.000	581.709.472	97,58	126.403.500	708.112.972	19,37
4.04.16.006.	Penagihan Rutin Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	380.000.000		385.000.000	372.167.572	96,67	56.911.000	429.078.572	112,92
4.04.16.020.	Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	7.200.000		7.200.000	7.200.000	100,00	-	7.200.000	100,00
4.04.16.029.	Sosialisasi dan Informasi Retribusi	Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi	72.000.000		50.460.000	50.460.000	100,00	-	50.460.000	70,08
4.04.16.038.	Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	Periode Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	7.500.000		7.500.000	7.500.000	100,00	-	7.500.000	100,00
4.04.16.045.	Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	90.000.000		100.000.000	98.571.900	98,57	-	98.571.900	109,52
4.04.16.046.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	42.000.000		46.000.000	45.810.000	99,59	-	45.810.000	109,07
4.04.16.050.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	909.160.684		-	-	-	20.515.000	20.515.000	2,26

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.19.039.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana	55.000.000				-	-	-	-
4.04.19.040.	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	278.868.200				-	-	-	-
4.04.19.041.	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah	429.028.000				-	-	-	-
4.04.19.043.	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah	55.000.000				-	-	-	-
4.04.19.050.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Peserta Bimtek pengelolaan aset daerah	55.000.000				-	-	-	-
4.04.20.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	592.194.700		105.700.000	105.635.000	99,94	37.367.800	143.002.800	24,15
4.04.20.008.	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	592.194.700		105.700.000	105.635.000	99,94	37.367.800	143.002.800	24,15
			52.107.837.005	0	10.078.481.787	9.014.118.835	89,44	4.222.949.190	13.100.643.050	25,14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dengan jelas disebutkan tugas Perangkat Daerah adalah sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oleh karenanya dalam hal kinerja pelayanan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan daerah, bukanlah kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah seperti tabel 2.2 berikut:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada. Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Kelemahan (Weaknes)

- Kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai khususnya dalam hal pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah yang ada di Perangkat Daerah, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan.
- Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi

3. Kesempatan/Peluang (Opportunity)

- Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;
- Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- Adanya Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang memungkinkan untuk terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien dalam hal penggaran Pendapatan dan belanja daerah baik pada tahap penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan ;

4. Tantangan/Ancaman (Treath)

- Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;

- Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

Review rancangan awal RKPK dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting. Perbandingan antara rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan dilakukan melalui seleksi program/kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas daerah. Review terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2020 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2020

Nama SKPK : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					10.441.248.789	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					14.965.500.223
	Keuangan					10.441.248.789	Keuangan					14.965.500.223
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.964.448.647	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.617.382.462		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	10.857.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	11.310.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	422.537.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	525.400.000		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (49 Org x 12 Bulan)	588 OB	380.069.455	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (57 Org x 12 Bulan)	684 OB	533.700.000		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	12 Bulan	93.899.936	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	12 Bulan	119.800.000		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	42.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	42.000.000		
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	21.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	21.000.000		
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	365 Eks	2.310.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	365 Eks	32.310.000		
8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	80.850.000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	80.850.000		
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah		Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	210.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah		Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	300.000.000		
##	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	1.800 OB	700.925.256	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	1.800 OB	951.012.462		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	966.614.550	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	2.233.375.000		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	426.615.000	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	680.000.000		
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	169.937.025	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	514.575.000		
3	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor		Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	105.000.000	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor		Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	610.000.000		
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	84 UB	118.062.525	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	84 UB	248.300.000		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	131.250.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	155.500.000		
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	12 Bulan	15.750.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	12 Bulan	25.000.000		
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	121.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	121.000.000		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	180 Pasang	60.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	180 Pasang	60.500.000		
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu		Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	180 Pasang	60.500.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu		Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	180 Pasang	60.500.000		
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	5 Orang	44.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	5 Orang	200.000.000		
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal		Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	12 Bulan	44.000.000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal		Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	12 Bulan	200.000.000		
E	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan Dokumen pelaporan keuangan	100%	39.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan Dokumen pelaporan keuangan	100%	64.215.800		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah buku laporan keuangan semesteran	3 Jenis Buku	39.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah buku laporan keuangan semesteran	3 Jenis Buku	64.215.800		
2	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Sementara dan Penerimaan Akhir Tahun		Periode pelaporan penerimaan sementara dan penerimaan akhir tahun	-	-	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Sementara dan Penerimaan Akhir Tahun		Periode pelaporan penerimaan sementara dan penerimaan akhir tahun	-	-		
F	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	1 Dokumen	1.452.000	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	1 Dokumen	1.452.000		
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Buku RENJA SKPD	1 Dokumen	1.452.000	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Buku RENJA SKPD	1 Dokumen	1.452.000		
H	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	12 Bulan	211.750.000	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	12 Bulan	927.000.000		
1	Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe		periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe	4 Triwulan	117.235.000	Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe		periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe	4 Triwulan	104.500.000		
2	Penataan Pengelolaan Kas dan Pertanggungjawaban Belanja		Periode pengelolaan kas dan pertanggung jawaban belanja	-	-	Penataan Pengelolaan Kas dan Pertanggungjawaban Belanja		Periode pengelolaan kas dan pertanggung jawaban belanja	-	111.700.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas		Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	12 Bulan	94.515.000	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas		Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	12 Bulan	-	
5						Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe		Tersusunnya Buku Laporan Register SP2D	-	194.600.000	Keg. Baru
6						Penyusunan Laporan Dana Transfer		Tersusunnya Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik	-	163.300.000	Keg. Baru
7						Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus		Tersusunnya Laporan Dana Otsus	-	120.400.000	Keg. Baru
8						Sistem Aplikasi Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe		Back Up Data ASN Kota Lhokseumawe	-	67.000.000	Keg. Baru
9						Rekonsiliasi Penerimaan Kas		Periode Rekonsiliasi Penerimaan Kas	-	89.700.000	Keg. Baru
10						Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa		Periode Verifikasi penyusunan laporan realisasi dana desa	-	75.800.000	Keg. Baru
1	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Besaran penerimaan PAD	49,20 Milyar	724.427.000	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Besaran penerimaan PAD	49,20 Milyar	1.916.488.250	
2						Penertiban Pajak Daerah		Periode penertiban pajak daerah	-	60.000.000	Keg. Baru
3						Pendataan Wajib Pajak PBB		Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	-	280.000.000	Keg. Baru
4						Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah		Periode Penagihan Rutin dan Penagihan Runggakan Pajak	-	285.000.000	Keg. Baru
11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak		Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	12 Bulan	217.020.750	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak		Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	12 Bulan	200.000.000	
12	Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah		Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	4 Triwulan	257.086.830	Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah		Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	4 Triwulan	257.086.830	
13	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah		Periode Pendataan Wajib Retribusi	4 Triwulan	179.516.420	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah		Periode Pendataan Wajib Retribusi	4 Triwulan	197.516.420	
14	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah		Periode pelaporan piutang retribusi daerah	12 Bulan	70.803.000	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah		Periode pelaporan piutang retribusi daerah	12 Bulan	123.275.000	
15						Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Periode Rekonsiliasi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan	-	100.000.000	Keg. Baru
16						Manajemen dan Pengelolaan Aplikasi SISMIOP NG		Periode Penertiban Pelanggaran Pajak Daerah	-	180.010.000	Keg. Baru
17						Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara		Jumlah Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	-	233.600.000	Keg. Baru
J	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	100%	4.585.706.050	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	100%	4.717.307.150	
1	Penyusunan analisa standar belanja		Jumlah Buku Analisa Standar (ASB)	50 Buku	42.871.500	Penyusunan analisa standar belanja		Jumlah Buku Analisa Standar (ASB)	50 Buku	40.000.000	
2	Penyusunan standar satuan harga		Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	100 Buku	52.500.000	Penyusunan standar satuan harga		Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	100 Buku	73.750.800	
3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	34.500.000	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	40.907.600	
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	3 Jenis Dokumen	1.349.873.500	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	3 Jenis Dokumen	1.429.273.500	
5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK		Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	3 Jenis Dokumen	241.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK		Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	3 Jenis Dokumen	242.000.000	
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	3 Jenis Dokumen	217.350.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	3 Jenis Dokumen	200.000.000	
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Jenis Dokumen	173.250.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Jenis Dokumen	185.000.000	
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	2 Jenis Buku	230.580.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	2 Jenis Buku	209.069.700	
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	5 Jenis Buku	87.140.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	5 Jenis Buku	92.095.400	
10						Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		Jumlah Sosialisasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah	-	130.800.000	Keg. Baru
11	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD		Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	50 Buku	59.883.000	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD		Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	50 Buku	61.760.000	
12	Pembinaan / Pergeseran Anggaran		Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	35 SKPD	62.239.000	Pembinaan / Pergeseran Anggaran		Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	35 SKPD	60.680.000	
13	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Rancangan	63.000.000	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Rancangan	64.110.800	
14	Peningkatan manajemen keuangan daerah		Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	3 Dok	242.445.000	Peningkatan manajemen keuangan daerah		Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	3 Dok	107.200.000	
15	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	163.724.400	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	157.308.100	
16	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan		Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	12 Bulan	178.500.000	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan		Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	12 Bulan	230.568.200	
17	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan		Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	200 Org	52.500.000	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan		Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	200 Org	63.400.000	
23	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dok	53.636.100	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dok	59.165.300	
26	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB		Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	4 Triwulan	177.702.350	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB		Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	4 Triwulan	150.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak		Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP	3 Jenis Blangko	247.932.050	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak		Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP	3 Jenis Blangko	247.446.000	
28	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB		Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	300 Lbr	105.265.100	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB		Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	300 Lbr	110.000.000	
30	Pengelolaan Pelaporan Keuangan		Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	4 Triwulan	23.415.000	Pengelolaan Pelaporan Keuangan		Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	4 Triwulan	69.302.800	
31	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja		Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja	1 Dokumen	14.175.000	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja		Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja	1 Dokumen	27.120.800	
32	Penyusunan Saldo Awal Laporan keuangan		Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan	1 Dokumen	37.135.350	Penyusunan Saldo Awal Laporan keuangan		Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan	1 Dokumen	38.456.600	
35	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak		Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	4 Triwulan	373.382.650	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak		Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	4 Triwulan	350.000.000	
36	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)		Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	100 Buku	77.688.100	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)		Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	100 Buku	68.128.100	
37	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	110 Buku	88.924.350	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	110 Buku	81.674.350	
38	Penyusunan Perubahan KUA		Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	95 Buku	43.178.300	Penyusunan Perubahan KUA		Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	95 Buku	43.178.300	
39	Penyusunan Perubahan PPAS		Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	105 Buku	91.915.300	Penyusunan Perubahan PPAS		Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	105 Buku	84.910.800	
K	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	175.450.000	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	179.657.300	
1	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran		Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	2 Jenis Buku	87.987.500	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran		Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	2 Jenis Buku	90.052.400	
2	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 Dok	87.462.500	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 Dok	89.604.900	
L	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	100 %	1.490.030.542	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	100 %	1.775.266.261	
1	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah		Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	3 Jenis Buku	31.728.661	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah		Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	3 Jenis Buku	31.728.661	
2	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah		Periode Inventarisasi,Sertifikasi Barang/Aset Daerah	12 Bulan	47.250.000	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah		Periode Inventarisasi,Sertifikasi Barang/Aset Daerah	12 Bulan	105.510.200	
3	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD		Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	4 Triwulan	94.500.000	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD		Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	4 Triwulan	55.200.000	
4	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	12 Bulan	480.000.000	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	12 Bulan	500.000.000	
5	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	12 Bulan	36.750.000	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	12 Bulan	36.750.000	
6	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	35 SKPD	52.500.000	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	35 SKPD	92.300.000	
7	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	35 SKPD	52.500.000	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	35 SKPD	118.350.000	
8	Pengelolaan Aplikasi Persediaan		Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	4 Triwulan	157.500.000	Pengelolaan Aplikasi Persediaan		Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	4 Triwulan	59.536.900	
9	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD		Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	4 Triwulan	157.500.000	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD		Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	4 Triwulan	82.750.000	
10	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Buku RKBMD	50 Buku	52.051.881	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Buku RKBMD	50 Buku	95.738.800	
11	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan		Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	4 Triwulan	52.500.000	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan		Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	4 Triwulan	60.600.400	
12	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang barang milik daerah	1 Dokumen	42.000.000	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang barang milik daerah	1 Dokumen	-	
13	Patok / Batas Aset Daerah		Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe	1 Paket	10.000.000	Patok / Batas Aset Daerah		Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe	1 Paket	75.311.300	
14	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah dokumen data teknis bangunan gedung milik Pemkot Lhokseumawe	1 Dokumen	10.000.000	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah dokumen data teknis bangunan gedung milik Pemkot Lhokseumawe	1 Dokumen	-	
15	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah		Jumlah Dokumen data lokasi aset tidak bergerak Pemkot Lhokseumawe	1 Dokumen	10.000.000	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah		Jumlah Dokumen data lokasi aset tidak bergerak Pemkot Lhokseumawe	1 Dokumen	-	
16	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana		Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana	1 Dokumen	10.000.000	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana		Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana	1 Dokumen	-	
17	Buku Status Barang Milik Daerah		Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	50 Buku	68.250.000	Buku Status Barang Milik Daerah		Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	50 Buku	71.490.000	
18	Sensus Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah	1 Dokumen	105.000.000	Sensus Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	
19	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah	1 Dokumen	-	
20	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah		Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Aset daerah	35 Orang	10.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah		Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Aset daerah	35 Orang	-	
21						Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah		Jumlah sertifikat dan jumlah pendataan ruas jalan / irigasi	10 Sertifikat dan 200 ruas jalan / irigasi	390.000.000	Keg. Baru
M	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Kota Lhokseumawe	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Bulan	117.370.000	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Kota Lhokseumawe	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Bulan	212.356.000	
1	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	117.370.000	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	118.682.800	
2						Pengelolaan Website dan Email BPKD		Periode Pengelolaan Website dan E-Mail BPKD Kota Lhokseumawe	-	93.673.200	Keg. Baru

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2020 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan dari masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 telah ditetapkan tema pembangunan yaitu “PENINGKATAN SDM UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS” dengan Lima (5) Prioritas Pembangunan Nasional seperti :

1. pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. insfrastruktur dan pemerataan wilayah.
3. nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja.
4. ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.
5. stabilitas pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, Tema Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2020 adalah “MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI” dengan Enam (6) Prioritas Pembangunan Aceh seperti :

1. hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing produk / jasa unggulan.
2. pembangunan Insfrastruktur terintegrasi.
3. peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan resiko bencana.
4. pembangunan sumber daya manusia.
5. reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.
6. penguatan Penerapan Dinul Islam dan Budaya Aceh.

Guna menjaga sinergitas pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, diperlukan telaahan terhadap setiap kebijakan prioritas pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui forum Konsultasi Publik RKPK Tahun

2020 telah menyepakati tema pembangunan untuk tahun 2020 yaitu “MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI” dengan Tujuh (7) Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe seperti:

1. penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya.
2. pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata.
3. peningkatan Kualitas Pendidikan.
4. peningkatan Pelayanan Kesehatan.
5. penataan Reformasi Birokrasi.
6. pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
7. peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan SKPK yang mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe diatas diketahui bahwa Perangkat Daerah akan mendukung prioritas ke-5 yaitu Penataan Reformasi Birokrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah. Penetapan tujuan akan mengarahkan pada perumusan arah kebijakan serta penetapan program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang fokus, spesifik, dan dapat dicapai.

Tujuan Perangkat Daerah yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 berdasarkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah “*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*”.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
2. meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK.

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam upaya mengsucceskan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2020 telah disusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Untuk mendukung optimalisasi dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK RI Perwakilan Aceh perlu kiranya dilakukan penambahan beberapa kegiatan baru dan juga dikarenakan terjadinya penyesuaian Nomenklatur Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perangkat daerah sehingga terjadi perbedaan antara rancangan awal RPKK dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, merencanakan 12 program dan 86 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 14.965.500.223,- (Empat belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Untuk lebih jelasnya seperti terangkum dalam Tabel 3.3 berikut:

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN PRAKIRAAN MAJU KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2020

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				14.965.500.223	DAU	-		11.116.343.063
4.04.	Keuangan				14.965.500.223	DAU	-		11.116.343.063
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe		2.617.382.462	DAU	-	100 %	2.160.893.512
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	11.310.000	DAU	-	12 Bulan	11.400.251
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	525.400.000	DAU	-	12 Bulan	463.663.850
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (55 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	660 OB	533.700.000	DAU	-	588 OB	399.072.727
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	119.800.000	DAU	-	12 Bulan	98.594.932
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	42.000.000	DAU	-	12 Bulan	44.100.000
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	21.000.000	DAU	-	12 Bulan	25.000.000
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	32.310.000	DAU	-	365 Eks	2.425.500
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	80.850.000	DAU	-	11 Bulan	84.892.500
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	300.000.000	DAU	-	12 Bulan	220.500.000
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	1.800 OB	951.012.462	DAU	-	1.800 OB	811.243.752
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe		2.233.375.000	DAU	-	100 %	1.063.276.005
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	8 Unit	680.000.000	DAU	-	7 Unit	485.239.685
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	5 Jenis	514.575.000	DAU	-	5 Jenis	189.470.669
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	610.000.000	DAU	-	12 Bulan	110.250.000
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	84 UB	248.300.000	DAU	-	84 UB	123.965.651

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	155.500.000	DAU	-	12 Bulan	137.812.500
02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	25.000.000	DAU	-	12 Bulan	16.537.500
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe		121.000.000	DAU	-	100%	133.100.000
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Lhokseumawe	180 Pasang	60.500.000	DAU	-	180 Pasang	66.550.000
03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Kota Lhokseumawe	180 Pasang	60.500.000	DAU	-	180 Pasang	66.550.000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	Kota Lhokseumawe		200.000.000	DAU	-	5 Orang	48.000.000
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	200.000.000	DAU	-	12 Bulan	48.000.000
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyediaan Dokumen pelaporan keuangan	Kota Lhokseumawe		64.215.800	DAU	-	100%	50.000.000
06.002.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah buku laporan keuangan semesteran	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	64.215.800	DAU	-	3 Jenis Buku	50.000.000
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe		1.452.000	DAU	-	1 Dokumen	1.597.200
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1.452.000	DAU	-	1 Dokumen	1.597.200
08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	Kota Lhokseumawe		-	DAU	-	1 Kali	20.000.000
08.001.	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Penyelenggaraan Pameran Daerah	Kota Lhokseumawe	-	-	DAU	-	-	20.000.000
15	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	Kota Lhokseumawe		927.000.000	DAU	-	12 Bulan	232.925.000
15.014.	Verifikasi Dokumen Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	104.500.000	DAU	-	4 Triwulan	127.906.250
15.016.	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	111.700.000	DAU	-	12 Bulan	105.018.750
15.017.	Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe	Tersusunnya Buku Laporan Register SP2D	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	194.600.000	DAU	-	-	-
15.018.	Penyusunan Laporan Dana Transfer	Tersusunnya Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	163.300.000	DAU	-	-	-
15.019.	Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus	Tersusunnya Laporan Dana Otsus	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	120.400.000	DAU	-	-	-
15.020.	Sistem Aplikasi Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	Back Up Data ASN Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	30 %	67.000.000	DAU	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.021.	Rekonsiliasi Penerimaan Kas	Periode Rekonsiliasi Penerimaan Kas	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	89.700.000	DAU	-	-	-
15.022.	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa	Periode Verifikasi penyusunan laporan realisasi dana desa	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	75.800.000	DAU	-	-	-
16	Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Besaran penerimaan PAD	Kota Lhokseumawe		1.916.488.250	DAU	-	49,20 Milyar	796.869.700
16.014.	Penertiban Pajak Daerah	Periode penertiban pajak daerah	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	60.000.000	DAU	-	-	-
16.020.	Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	280.000.000	DAU	-	-	-
16.021.	Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	Periode Penagihan Rutin dan Penagihan Runggakan Pajak	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	285.000.000	DAU	-	-	-
16.050.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	200.000.000	DAU	-	12 Bulan	235.982.463
16.052.	Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	257.086.830	DAU	-	4 Triwulan	269.941.171
16.053.	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Periode Pendataan Wajib Retribusi	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	197.516.420	DAU	-	4 Triwulan	208.492.241
16.054.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Periode pelaporan piutang retribusi daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	123.275.000	DAU	-	12 Bulan	82.453.825
16.055.	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode Rekonsiliasi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	100.000.000	DAU	-	-	-
16.056.	Manajemen dan Pengelolaan Aplikasi SISMIOP NG	Periode Penertiban Pelanggaran Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	180.010.000	DAU	-	-	-
16.057.	Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	Kota Lhokseumawe	6 Kali	233.600.000	DAU	-	-	-
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	Kota Lhokseumawe		4.717.307.150	DAU	-	100%	4.648.546.050
17.001.	Penyusunan analisa standar belanja	Jumla Buku Analisa Standar (ASB)	Kota Lhokseumawe	50 Buku	40.000.000	DAU	-	50 Buku	43.000.000
17.002.	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	Kota Lhokseumawe	100 Buku	73.750.800	DAU	-	100 Buku	53.500.000
17.003.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dok	40.907.600	DAU	-	1 Dok	35.000.000
17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Dokumen	1.429.273.500	DAU	-	3 Jenis Dokumen	1.349.873.500
17.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Dokumen	242.000.000	DAU	-	3 Jenis Dokumen	243.050.000
17.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Dokumen	200.000.000	DAU	-	3 Jenis Dokumen	218.500.000
17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Dokumen	185.000.000	DAU	-	3 Jenis Dokumen	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	Kota Lhokseumawe	2 Jenis Buku	209.069.700	DAU	-	2 Jenis Buku	232.500.000
17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	Kota Lhokseumawe	5 Jenis Buku	92.095.400	DAU	-	5 Jenis Buku	90.000.000
17.014.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Sosialisasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	2 Kali	130.800.000	DAU	-	-	-
17.021.	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	Kota Lhokseumawe	50 Buku	61.760.000	DAU	-	50 Buku	61.500.000
17.022.	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	Kota Lhokseumawe	35 SKPD	60.680.000	DAU	-	35 SKPD	64.500.000
17.023.	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	1 Rancangan	64.110.800	DAU	-	1 Rancangan	63.200.000
17.026.	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	Kota Lhokseumawe	3 Dok	107.200.000	DAU	-	3 Dok	243.000.000
17.027.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	157.308.100	DAU	-	3 Jenis Buku	165.000.000
17.028.	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	230.568.200	DAU	-	12 Bulan	179.500.000
17.029.	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	Kota Lhokseumawe	200 Org	63.400.000	DAU	-	200 Org	52.700.000
17.035.	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dok	59.165.300	DAU	-	1 Dok	56.317.903
17.039.	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	150.000.000	DAU	-	4 Triwulan	186.587.468
17.040.	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Blangko	247.446.000	DAU	-	3 Jenis Blangko	249.912.732
17.041.	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB	Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	Kota Lhokseumawe	300 Lbr	110.000.000	DAU	-	300 Lbr	106.528.355
17.046.	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	69.302.800	DAU	-	4 Triwulan	24.585.750
17.047.	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja	Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	27.120.800	DAU	-	1 Dokumen	15.883.750
17.048.	Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	38.456.600	DAU	-	1 Dokumen	40.148.759
17.051.	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	350.000.000	DAU	-	4 Triwulan	377.051.783
17.052.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	Kota Lhokseumawe	100 Buku	68.128.100	DAU	-	100 Buku	82.688.100
17.053.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	Kota Lhokseumawe	110 Buku	81.674.350	DAU	-	110 Buku	93.924.350
17.054.	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	Kota Lhokseumawe	95 Buku	43.178.300	DAU	-	95 Buku	48.178.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.055.	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	Kota Lhokseumawe	105 Buku	84.910.800	DAU	-	105 Buku	96.915.300
18	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe		179.657.300	DAU	-	WTP	192.995.000
18.002.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	Kota Lhokseumawe	2 Jenis Buku	90.052.400	DAU	-	2 Jenis Buku	96.773.125
18.005.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dok	89.604.900	DAU	-	1 Dok	96.221.875
19	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	Kota Lhokseumawe		1.775.266.261	DAU	-	100 %	1.639.033.596
19.004.	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	31.728.661	DAU	-	3 Jenis Buku	33.315.094
19.008.	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi, Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	105.510.200	DAU	-	12 Bulan	49.612.500
19.009.	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	55.200.000	DAU	-	4 Triwulan	99.225.000
19.011.	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	500.000.000	DAU	-	12 Bulan	521.501.527
19.012.	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	36.750.000	DAU	-	12 Bulan	38.587.500
19.026.	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	Kota Lhokseumawe	35 SKPD	92.300.000	DAU	-	35 SKPD	55.125.000
19.028.	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	Kota Lhokseumawe	35 SKPD	118.350.000	DAU	-	35 SKPD	55.125.000
19.030.	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	59.536.900	DAU	-	4 Triwulan	165.375.000
19.031.	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	82.750.000	DAU	-	4 Triwulan	165.375.000
19.033.	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD	Kota Lhokseumawe	50 Buku	95.738.800	DAU	-	50 Buku	54.654.475
19.034.	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	60.600.400	DAU	-	4 Triwulan	55.125.000
19.035.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang barang milik daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	-	DAU	-	1 Dokumen	44.100.000
19.036.	Patok / Batas Aset Daerah	Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Paket	75.311.300	DAU	-	1 Paket	20.000.000
19.037.	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen data teknis bangunan gedung milik Pemkot Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	-	DAU	-	1 Dokumen	20.000.000
19.038.	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen data lokasi aset tidak bergerak Pemkot Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	-	DAU	-	1 Dokumen	20.000.000
19.039.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	-	DAU	-	1 Dokumen	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.040.	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	50 Buku	71.490.000	DAU	-	50 Buku	71.662.500
19.041.	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	-	DAU	-	1 Dokumen	110.250.000
19.043.	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	-	DAU	-	1 Dokumen	20.000.000
19.050.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Peserta Bimtek pengelolaan aset daerah	Kota Lhokseumawe	35 Orang	-	DAU	-	35 Orang	20.000.000
19.052.	Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah sertifikat dan jumlah pendataan ruas jalan / irigasi	Kota Lhokseumawe	10 Sertifikat dan 200 ruas jalan / irigasi	390.000.000	DAU	-	-	-
20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Kota Lhokseumawe		212.356.000	DAU	-	12 Bulan	129.107.000
20.008.	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	118.682.800	DAU	-	12 Bulan	129.107.000
20.010.	Pengelolaan Website dan Email BPKD	Periode Pengelolaan Website dan E-Mail BPKD Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	93.673.200	DAU	-	-	-

BAB IV

P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Renja ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020. Guna menjamin terlaksananya program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang kerja di lingkungan Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 bila diperlukan.
4. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Lhokseumawe, 30 September 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**



AZWAR, SH, MAP

NIP. 19630925 200212 1 003